



SP – 03 /DJPK/2026

**Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah, Pemerintah Meresmikan
Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) Untuk
Antisipasi Dampak Fiskal Bencana**

Jakarta, 31 Agustus 2026 – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Sistem ini merupakan decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.

Peluncuran ARISE berlangsung dalam acara Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Senin (31/8). Forum ini dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.

Dari Respons Reaktif Menuju Pengelolaan Risiko Proaktif

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menegaskan bahwa bencana menimbulkan tekanan fiskal dari dua sisi: menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja. Karena itu, pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara terukur dan proaktif, bukan hanya sebagai respons pascabencana.

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujarnya.

ARISE sebagai Jembatan Informasi Risiko dan Perencanaan Fiskal Daerah

ARISE dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi. Bagi Pemerintah Pusat, ARISE menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi Bertahap: Bali sebagai Pilot, Diperluas ke Empat Provinsi

Implementasi awal ARISE dilakukan di Provinsi Bali. Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berkomitmen memperluas ke empat provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Dalam jangka panjang, ARISE diharapkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia guna memperkuat kapasitas daerah dalam mengantisipasi dampak fiskal bencana.

Komitmen Kolaboratif Lintas Pemangku Kepentingan

Peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan seperti DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB. Kolaborasi ini menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang proaktif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Narahubung Media:

Ludiro
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



☎ 081310004134

✉ kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



ditjenpk



@ditjenpk



DitjenPK
Kemenkeu RI